

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori dan Telaah Pustaka

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Teori Stakeholder menyatakan bahwa perusahaan bukanlah suatu organisasi yang hanya sekedar bertanggung jawab terhadap para pemilik (shareholders) namun juga harus mementingkan dan memberi manfaat kepada para stakeholder-nya (pemegang saham, konsumen, investor, kreditor, supplier, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan). Hummels (1998) dalam Ardian & Raharja (2013) mendefinisikan : (stakeholder are) individuals and groups who have legitimate claim on the organization to participate in the decision making process simply because they are affected by the organization's practices, policies and actions.

Batasan stakeholder tersebut diatas mengisyaratkan perusahaan hendaknya memperhatikan stakeholder, karena mereka adalah pihak yang mempengaruhi dan dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan yang diambil dan dilakukan perusahaan. Apabila perusahaan tidak memperhatikan stakeholder maka dapat dipastikan perusahaan akan menuai protes dan dapat mengeliminasi legitimasi stakeholder.

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan serta kepentingan terhadap perusahaan. Perusahaan merupakan bagian dari sistem nilai sosial yang ada dalam sebuah wilayah baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional berarti perusahaan merupakan bagian dari masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat sendiri menurut definisinya bisa dijelaskan sebagai kumpulan peran yang diwujudkan oleh elemen-elemen (individu dan kelompok) pada suatu kedudukan tertentu yang peran-peran tersebut diatur melalui pranata sosial yang bersumber dari kebudayaan yang telah ada dalam masyarakat (Budimanta, dkk, 2008 dalam Ardian & Raharja, 2013)

Agar perusahaan mampu berkembang dan bertahan lama di dalam masyarakat maka perusahaan membutuhkan dukungan dari para stakeholder-nya. Para stakeholder memerlukan beragam informasi terkait kebijakan serta aktivitas perusahaan yang nantinya akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Salah satu informasi yang dapat menarik dukungan para stakeholder dan saat ini menjadi isu penting adalah kinerja lingkungan.

2.1.2 Teori Agensi

Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang memberi wewenang (principal) yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Jansen dan Meckling (1986) dalam Fahrizqi (2010) menyatakan hubungan keagenan adalah suatu kontrak di mana satu atau lebih orang (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan beberapa

layanan atas nama mereka yang melibatkan mendelegasikan sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Sehingga terjadi konflik kepentingan antara pemilik dan agen karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan prinsipal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut.

Dalam hubungan agensi tersebut, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yaitu biaya pengawasan (*monitoring costs*), biaya kontrak (*contracting costs*), dan visibilitas politis. Perusahaan yang melakukan pengungkapan informasi tanggung jawab sosial dengan tujuan untuk membangun image pada perusahaan dan mendapatkan perhatian dari masyarakat. Perusahaan memerlukan biaya dalam rangka untuk memberikan informasi pertanggungjawaban sosial, sehingga laba yang dilaporkan dalam tahun berjalan menjadi lebih rendah.

Ketika perusahaan menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah dan visibilitas politis yang tinggi akan cenderung untuk mengungkapkan informasi pertanggungjawaban sosial. Jadi pengungkapan informasi pertanggungjawaban sosial berhubungan positif dengan kinerja sosial, kinerja

ekonomi dan visibilitas politis dan berhubungan negatif dengan biaya kontrak dan pengawasan (biaya keagenan), (Belkaoui dan Karpik, 1989)

Berdasarkan teori agensi, perusahaan yang menghadapi biaya kontrak dan biaya pengawasan yang rendah cenderung akan melaporkan laba bersih rendah atau dengan kata lain akan mengeluarkan biaya-biaya untuk kepentingan manajemen (salah satunya biaya yang dapat meningkatkan reputasi perusahaan di mata masyarakat). Kemudian, sebagai wujud pertanggungjawaban, manajer sebagai agen akan berusaha memenuhi seluruh keinginan pihak prinsipal, dalam hal ini adalah pengungkapan informasi pertanggung-jawaban sosial perusahaan.

2.1.3 Definisi Pengungkapan (*disclosure*)

Bagi pihak-pihak diluar manajemen suatu perusahaan, laporan keuangan merupakan jendela informasi yang memungkinkan mereka untuk mengetahui kondisi suatu perusahaan pada suatu masa pelaporan. Secara konseptual, pengungkapan merupakan bagian dari integral dari pelaporan keuangan, secara teknis, pengungkapan merupakan langkah akhir dalam proses akuntansi, yaitu penyajian informasi dalam bentuk seperangkat penuh statement keuangan. Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengartikan pengungkapan sebagai berikut:

“Disclosure mean supplying information in the financial statement, including the statements themselves, the notes to the statement, and the supplementary disclosures associated with the statement. It does not extend to public or private statement made by management or information provided outside the financial statement.”

Secara spesifik, Wolk, Tearney, dan Dodd (2001) dalam Suwardjono (2005) menginterpretasi pengertian pengungkapan sebagai berikut:

“Broadly interpreted, disclosure is concerned with the information in both the financial statements and supplementary communication including footnote, post-statement events, managements discussion and analysis of operation for the forthcoming years, financial and reporting forecasts, and additional financial statements covering, segmental and extensions beyond historical cost.”

Evans berhasil membatasi pengertian pengungkapan hanya pada hal-hal yang menyangkut pelaporan keuangan. Pernyataan manajemen dalam surat kabar atau media massa lain serta informasi diluar lingkup pelaporan keuangan tidak masuk dalam pengertian pengungkapan.

Secara umum, tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Sedangkan tujuan khususnya yaitu sebagai berikut :

1. Tujuan Melindungi

Tujuan melindungi dilandasi oleh gagasan bahwa tidak semua pemakai cukup canggih sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang mereka tidak mungkin memperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos-statement keuangan. Dengan kata lain, pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang makin kurang adil dan terbuka (*unfair*).

2. Tujuan Informatif

Tujuan informatif dilandasi oleh gagasan bahwa pemakai yang dituju sudah jelas dengan tingkat kecanggihan tertentu. Dengan demikian, pengungkapan diarahkan

untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai tersebut.

3. Tujuan Kebutuhan Khusus

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan public dan tujuan informative. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang perlu bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan pengawas berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

2.1.4 Pengungkapan Sosial sebagai Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan cenderung untuk mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan aktivitasnya dan dampak yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut (Gray, dkk dalam Rosmasita 2007) menyebutkan ada tiga studi, yaitu:

1. *Decision Usefulness Studies*

Balkaoui dan Karpik (1989) dalam Anggraini (2006) mengemukakan bahwa perusahaan yang melakukan aktivitas sosial akan mengungkapkannya dalam laporan keuangan. Sebagian dari studi-studi yang dilakukan oleh para peneliti yang mengemukakan pendapat ini menemukan bukti bahwa informasi sosial dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Para analis, banker dan pihak lain yang dilibatkan dalam penelitian tersebut diminta untuk melakukan pemeringkatan terhadap informasi akuntansi. Informasi akuntansi tersebut tidak terbatas pada informasi akuntansi tradisional yang telah dinilai selama ini, tetapi

juga informasi yang lain yang relatif baru dalam wacana akuntansi.

Mereka menempatkan informasi aktivitas sosial perusahaan pada posisi yang lebih penting.

2. *Economic Theory Studies*

Studi ini menggunakan *agency theory* dimana menganalogikan manajemen sebagai agen dari suatu prinsipal. Lazimnya, prinsipal diartikan sebagai pemegang saham atau pengguna tradisional lainnya. Namun, pengertian prinsipal tersebut meluas menjadi seluruh *interest group* perusahaan yang bersangkutan. Sebagai agen, manajemen akan berupaya mengoperasikan perusahaan sesuai dengan keinginan publik.

3. *Social and Political Theory Studies*

Studi di bidang ini menggunakan teori *stakeholder*, teori legitimasi organisasi dan teori ekonomi politik. Teori *stakeholder* mengasumsikan bahwa eksistensi perusahaan ditentukan oleh para *stakeholder*.

Pengungkapan kinerja sosial pada laporan tahunan perusahaan seringkali dilakukan secara sukarela oleh perusahaan. Adapun alasan-alasan perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial secara tidak sukarela (Henderson and Person dalam Kuntari dan Sulistyani, 2007) antara lain:

a. *Internal decision making*

Manajemen membutuhkan informasi untuk menentukan efektifitas dari informasi sosial tertentu dalam mencapai tujuan sosial perusahaan. Data harus tersedia agar biaya dari pengungkapan tersebut dapat diperbandingkan dengan manfaatnya bagi perusahaan. Walaupun hal ini

sulit diidentifikasi dan diukur, tetapi analisis secara sederhana lebih baik dari pada tidak sama sekali.

b. *Product differentiation*

Akuntansi kontemporer tidak memisahkan pencatatan biaya dan manfaat aktivitas sosial perusahaan dalam laporan keuangan, sehingga perusahaan yang tidak bertanggung jawab akan terlihat lebih sukses dibandingkan perusahaan yang bertanggung jawab. Hal ini mendorong perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengungkapkan informasi tersebut sehingga masyarakat dapat membedakan mereka dari perusahaan lain.

c. *Enlightened self interest*

Perusahaan melakukan pengungkapan untuk menjaga keselarasan sosialnya dengan para stakeholder yang terdiri dari *stockholder*, kreditur, karyawan, pemasok, pelanggan, pemerintah dan masyarakat karena mereka dapat mempengaruhi penjualan dan harga saham perusahaan.

Pengungkapan sosial yang diungkapkan perusahaan merupakan informasi yang sifatnya bersifat wajib. Undang-undang tentang tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia diatur dalam UU PT No.40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa PT yang menjalankan usaha di bidang dan/atau bersangkutan dengan sumber daya alam wajib menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan (Pasal 74 ayat 1). UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 15 (b) menyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.". Perusahaan mempunyai keragaman dalam pengungkapan. Keragaman pengungkapan disebabkan entitas yang dikelola oleh

manajer yang memiliki filosofi manajerial yang berbeda dan keluasan dalam kaitannya dengan pengungkapan informasi kepada masyarakat.

Standar pelaporan pengungkapan pertanggungjawaban sosial sampai saat ini belum mempunyai standar yang baku, hal ini dikarenakan adanya permasalahan yang berhubungan dengan biaya dan manfaat sosial. Perusahaan dapat membuat sendiri model pelaporan pengungkapan pertanggungjawaban sosialnya.

2.1.5 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Ebert (2003) dalam Rosmasita (2007) mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai usaha perusahaan untuk menyeimbangkan komitmen-komitmennya terhadap kelompok-kelompok dan individual-individual dalam lingkungan perusahaan tersebut, termasuk didalamnya adalah pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, para karyawan, dan investor. Tanggung jawab sosial perusahaan memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholders* yang melebihi tanggung jawab di bidang hukum.

Dalam kemajuan industri sekarang, tekanan masyarakat kepada perusahaan agar mereka melakukan pembenahan sistem operasi perusahaan menjadi suatu sistem yang memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap sosial sangat kuat, perkembangan teknologi dan industri yang pesat menuntut untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sekitar. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada kinerja keuangan perusahaan saja, tetapi juga perusahaan harus bertanggung jawab terhadap masalah sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan.

Menurut The World Council for Sustainable Development (WBCSD), Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan didefinisikan sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta perwakilan mereka, keluarga mereka, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat baik bagi bisnis sendiri maupun untuk pembangunan.

Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam perusahaan-perusahaan diharapkan selain memiliki komitmen finansial kepada pemilik atau pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga memiliki komitmen sosial terhadap para pihak lain yang berkepentingan, karena tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salahsatu bagian dari strategi bisnis perusahaan dalam jangka panjang. Adapun tujuan dari tanggung jawab sosial perusahaan adalah :

1. Untuk meningkatkan citra perusahaan dan mempertahankan, biasanya secara implisit, asumsi bahwa perilaku perusahaan secara fundamental adalah baik.
2. Untuk membebaskan akuntabilitas organisasi atas dasar adanya kontrak sosial diantara organisasi dan masyarakat. Keberadaan kontrak sosial ini menuntut dibebaskannya akuntabilitas sosial.
3. Sebagai perpanjangan dari pelaporan keuangan tradisional dan tujuannya adalah untuk memberikan informasi kepada investor.

Untuk itulah maka pertanggungjawaban sosial perusahaan (CSR) perlu diungkapkan dalam perusahaan sebagai wujud pelaporan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu bentuk pertanggung jawaban sosial yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan atas dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas operasionalnya. Selain melakukan aktivitas yang berorientasi pada laba, perusahaan perlu melakukan aktivitas lain, misalnya aktivitas untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman bagi para karyawannya, menjamin bahwa proses produksinya tidak mencemarkan lingkungan sekitar perusahaan, melakukan penempatan tenaga kerja secara jujur , menghasilkan produk yang aman bagi konsumen, menjaga lingkungan sekitar untuk mewujudkan kepedulian sosial perusahaan.

2.1.6 Profitabilitas

Hubungan antara kinerja keuangan suatu perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab sosial menurut Belkaoui dan Karpik (1989) paling baik diekspresikan dengan pandangan bahwa tanggapan sosial yang diminta dari manajemen sama dengan kemampuan yang diminta untuk membuat suatu perusahaan memperoleh laba. Seperti yang dinyatakan oleh Alexander dan Bucholdz (1978) dalam Belkaoui dan Karpik (1989) bahwa manajemen yang sadar dan memperhatikan masalah sosial juga akan mengajukan kemampuan yang diperlukan untuk menggerakkan kinerja keuangan perusahaan.

Konsekuensinya, perusahaan yang mempunyai respon sosial dalam hubungannya dengan pengungkapan tanggung jawab sosial seharusnya menyingkirkan

seseorang yang tidak merespon hubungan antara profitabilitas perusahaan dengan variabel akuntansi seperti tingkat pengembalian investasi dan variabel pasar seperti *differensial return* harga saham (Sembiring, 2003).

Parsa dan Kouhy (1994) dalam penelitiannya pada perusahaan di Inggris menemukan bahwa profitabilitas mempunyai hubungan dengan pengungkapan sosial. Roberts (1992) dan Gray dkk (1999) seperti dikutip Parsa dan Kouhy (1994) menemukan bahwa pengungkapan sosial dan lingkungan mempunyai hubungan positif dengan tingkat profitabilitas perusahaan. Cornell dan Shapiro (1987) dalam Parsa dan Kouhy (1994), menyatakan;

Companies that disclosed social information were likely to have lower implicit costs in exchange for higher explicit costs. And this could be one reason that they are more profitable.

Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham (Heinze, 1976 dalam Hackston dan Milne, 1996). Sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial (Bowman dan Haire, 1976 dan Preston, 1978 dalam Hackston dan Milne 1996). Hackston dan Milne (1996) menemukan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial. Belkaoui dan Karpik (1989) mengatakan bahwa dengan kepeduliannya terhadap masyarakat (sosial) menghendaki manajemen untuk membuat perusahaan menjadi *profitable*. (Anggraini, 2006).

Penelitian tentang hubungan profitabilitas dengan pengungkapan informasi sosial atau tanggung jawab sosial menunjukkan hasil bahwa antar keduanya tidak

ditemukan adanya hubungan (Sembiring, 2003 dan 2005 dan Anggraini, 2006). Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya jumlah sampel dan periode pengamatan. Penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur profitabilitas.

ROA adalah rasio keuangan perusahaan yang berhubungan dengan aspek earning atau profitabilitas. ROA berfungsi untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki. Semakin besar ROA yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva oleh perusahaan untuk beroperasi sehingga akan memperbesar laba. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan tersebut memiliki tingkat pengembalian yang semakin tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa, ROA adalah suatu alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba berdasarkan penggunaan aktiva perusahaan. Anthony dan Govindarajan,(2002: 345).

Alasan penelitian menggunakan ROA dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu alat ukur finansial yang sampai saat ini masih digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian investasi. Keunggulan ROA dibanding ROE menurut ukuran *profitabilitas* adalah *Return on Asset* (ROA) memfokuskan kemampuan perusahaan untuk memperoleh earning dalam operasi perusahaan, sedangkan *Return on Equity* (ROE) hanya mengukur return yang diperoleh dari investasi pemilik perusahaan dalam bisnis tersebut. Siamat (2002, 84).

2.1.7 Leverage

Menurut Makmun (2002) dalam Bramantya (2010) *Leverage* keuangan (*ratio leverage*) adalah perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk membiayai perusahaan atau perbandingan antara dana yang diperoleh dari eksternal perusahaan (dari kreditur-kreditur) dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang.

Menurut Belkaoui dan Karpik (1989) dalam Sembiring (2005) Berdasarkan teori agensi, tingkat *leverage* yang diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) mempunyai pengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, manajemen perusahaan dengan tingkat DER yang tinggi cenderung mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial yang dibuatnya agar tidak menjadi sorotan dari para *debtholders*.

Karena dengan semakin tingginya ratio DER maka kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian kontrak akan lebih besar, oleh karena itu manajer akan menggunakan metode akuntansi yang memaksimalkan laba yang ada dengan cara mengurangi biaya yang ada salah satunya biaya pengungkapan sosial.

2.1.8 Konvergensi IFRS di Indonesia

Beberapa tahun terakhir *International Financial Reporting Standards* (IFRS) menjadi topik yang hangat di tanah air. Pertemuan G-20 tahun 2008 di Washington (USA) menghasilkan beberapa poin penting. Salah satu poin penting tersebut adalah peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan

kesepakatan anggota G20, peningkatan transparansi dan akuntabilitas akan tercapai jika regulator suatu negara menetapkan *a single set of high quality global accounting standards* (Martani, 2012).

Menurut Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dalam Situmorang (2011), tingkat pengadopsian IFRS dapat dibedakan menjadi 5 tingkat:

1. *Full Adoption*; Suatu negara mengadopsi seluruh standar IFRS dan menerjemahkan IFRS sama persis ke dalam bahasa yang negara tersebut gunakan.
2. *Adopted*; Program konvergensi PSAK ke IFRS telah dicanangkan IAI pada Desember 2008. *Adopted* maksudnya adalah mengadopsi IFRS namun disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut.
3. *Piecemeal*; Suatu negara hanya mengadopsi sebagian besar nomor IFRS yaitu nomor standar tertentu dan memilih paragraf tertentu saja.
4. *Referenced (konvergence)*; Sebagai referensi, standar yang diterapkan hanya mengacu pada IFRS tertentu dengan bahasa dan paragraf yang disusun sendiri oleh badan pembuat standar.
5. *Not adopted at all*; Suatu negara sama sekali tidak mengadopsi IFRS. Indonesia menganut bentuk yang mengambil IFRS sebagai referensi dalam sistem akuntansinya.

Program konvergensi IFRS ini dilakukan melalui tiga tahapan yakni tahap adopsi mulai 2008 sampai 2011 dengan persiapan akhir penyelesaian infrastruktur dan tahap implementasi pada 2012. Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK – IAI) telah menetapkan *roadmap*. Pada tahun 2009, Indonesia belum mewajibkan perusahaan-perusahaan *listing* di BEI menggunakan sepenuhnya IFRS, melainkan

masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan nasional atau PSAK. Namun pada tahun 2010 bagi perusahaan yang memenuhi syarat, adopsi IFRS sangat dianjurkan. Sedangkan pada tahun 2012, Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan DSAK merencanakan untuk menyusun/merevisi PSAK agar secara material sesuai dengan IAS/IFRS versi 1 Januari 2009. Pemerintah dalam hal ini Bapepam-LK, Kementerian Keuangan sangat mendukung program konvergensi PSAK ke IFRS.

Hal ini sejalan dengan kesepakatan pemimpin negara-negara yang tergabung dalam G20 yang salah satunya adalah untuk menciptakan satu set standar akuntansi yang berkualitas yang berlaku secara internasional. Disamping itu, program konvergensi PSAK ke IFRS juga merupakan salah satu rekomendasi dalam *Report on the Observance of Standards and Codes on Accounting and Auditing* yang disusun oleh *assessor World Bank* yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari *Financial Sector Assessment Program (FSAP)* (BAPEPAM LK, 2010 dalam Situmorang, 2011).

Konvergensi PSAK ke IFRS memiliki manfaat sebagai berikut: Pertama, meningkatkan kualitas standar akuntansi keuangan (SAK). Kedua, mengurangi biaya SAK. Ketiga, meningkatkan kredibilitas dan kegunaan laporan keuangan. Keempat, meningkatkan komparabilitas pelaporan keuangan. Kelima, meningkatkan transparansi keuangan. Keenam, menurunkan biaya modal dengan membuka peluang penghimpunan dana melalui pasar modal. Ketujuh, meningkatkan efisiensi penyusunan laporan keuangan.

2.1.9 *Historical Cost dan Fair Value*

Sebelum adanya IFRS, akuntansi umumnya menggunakan *historical cost* untuk pengukuran transaksinya. *Historical cost* merupakan jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi, atau jumlah kas atau setara kas yang diperoleh dari kewajiban. Jumlah yang dapat diatribusikan langsung ke aset pada saat pertama kali diakui sesuai dengan persyaratan tertentu didalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Menurut Suwardjono (2005) prinsip *historical cost* menghendaki digunakannya harga perolehan dalam mencatat aktiva, utang, modal dan biaya. Maksud dari harga perolehan adalah harga pertukaran yang disetujui oleh kedua belah pihak yang tersangkut dalam transaksi. Sedangkan *fair value* adalah jumlah rupiah yang disepakati untuk suatu obyek dalam suatu transaksi antara pihak-pihak yangberkehendak bebas tanpa tekanan atau keterpaksaan.

FASB Concept Statement No. 7 menyatakan bahwa *fair value* adalah harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang tertata antara partisipan di pasar dan tanggal pengukuran. Contohnya kendaraan untuk operasional yang diperoleh tahun 2010 senilai 160 juta, berdasarkan konsep *historical cost* maka pada tahun 2013 kendaraan tersebut tetap dicantumkan sebesar 160 juta sedangkan nilai sesungguhnya pada tahun 2013 (mungkin) tinggal 140 juta. Konsep *fair value* menghendaki kendaraan dicantumkan sebesar 140 juta (sesuai harga pasar atau nilai wajarnya).

Transaksi dengan menggunakan *historical cost* memiliki kelemahan yaitu kurang mencerminkan kondisi yang sebenarnya pada tahun sesudah transaksi. Sebab dengan adanya pemakaian maka nilai dari suatu aset (kecuai tanah) akan mengalami penurunan. Sehingga pengakuan aset pada tanggal neraca tetap dicantumkan sebesar nilai perolehannya, sementara nilai sesungguhnya dari aset tersebut tidak sebesar yang tercantum.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pada tabel 2.1 ringkasan penelitian terdahulu mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate sosial responsibility* yang menjadi landasan penelitian ini

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sembiring (2005)	Karakteristik Perusahaan Dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bursa Efek Jakarta	Variabel dependen : Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan Variabel Independen : Profitabilitas dan leverage	Profitabilitas dan Leverage terbukti tidak signifikan , ukuran dewan komisaris positif dan signifikan, Profile perusahaan positif signifikan dan size berpengaruh signifikan perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
2	Novrianto (2012)	Pengaruh <i>Leverage</i> , Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Informasi Sosial	Variabel Dependen : Pengungkapan informasi sosial Variabel Independen : Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran	Leverage tidak memiliki pengaruh signifikan, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pengungkapan informasi

		Pada Perusahaan Manufaktur Di Bei	perusahaan	sosial.
3	Putri (2014)	Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	Variabel Dependen : Pengungkapan CSR Variabel Independen : Profitabilitas, likuiditas, dan leverage	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, Likuiditas tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR..
4	Kadek Umi Sukma Pebriana dan I Made Sukartha (2011)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Umur Perusahaan, Komposisi Dewan Direksi Dan Kepemilikan Institusional Pada Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (Csr) Di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen : Pengungkapan CSR Variabel Independen : profitabilitas, leverage, umur perusahaan, komposisi dewan direksi dan kepemilikan konstitusional.	Profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan , <i>Leverage</i> tidak berpengaruh secara signifikan , Umur perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan , Komposisi dewan direksi berpengaruh secara signifikan , Kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR.
5	Chintya Fadila Laksmi ningrum dan Agus Purwanto (2013)	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan CSR	Variabel Dependen : Pengungkapan CSR Variabel Independen : Karakteristik perusahaan, ukuran dewan komisaris, struktur kepemilikan	Profitabilitas, likuiditas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan, ukuran dewan komisaris, struktur kepemilikan saham institusi, manajerial dan asing seluruhnya berpengaruh positif terhadap variabel pengungkapan CSR
6	Linda Santioso Dan Erlina Chandra (2012)	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Umur Perusahaan, Dan Dewan Komisaris Independen	Variabel dependen : Pengungkapan CSR Variabel Independen : profitabilitas, ukuran perusahaan, leverage, umur	Profitabilitas , proporsi dewan komisaris dan Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR. Leverage dan umur perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan CSR

		Dalam Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i>	perusahaan, dan dewan komisaris independen	
7	Akhmad Nurkhin (2010)	<i>Corporate Governance</i> Dan Profitabilitas, Pengaruhnya Terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan	Variabel Dependen : Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. Variabel Independen : Corporate Governance dan profitabilitas	Tidak ada hubungan yang signifikan antara kepemilikan institusional dan pengungkapan CSR. Tetapi, ditemukan adanya hubungan yang signifikan antara <i>independent commissioner board</i> , <i>profitability</i> , dan pengungkapan CSR.
8	Nurul Kusuma Wardani dan Indira Januarti	Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)	Variabel Dependen : Pengungkapan CSR Variabel Independen : Karakteristik Perusahaan	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial (CSR), Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap CSR. <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap CSR
9	Ursula dan Pratiwi (2014)	Analisis perbedaan kualitas akuntansi sebelum dan sesudah IFRS	Variabel Dependen : Kualitas akuntansi Variabel Independen : IFRS	Ada perbedaan pada kualitas akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS
10	Ni Kadek Intan dan Ni Made Adi (2014)	Analisis komparatif kinerja perusahaan sebelum dan sesudah konvergensi IFRS	Variabel Dependen : Kinerja perusahaan Variabel Independen : IFRS	Loan Asset Ratio, Return on Asset dan Debt Equity Ratio mengalami perbedaan sebelum dan sesudah IFRS

2.3 Model Penelitian

Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, memiliki kaitan erat dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Hal ini dikarenakan manusia sebagai makhluk hidup tidak akan pernah lepas dari kebutuhan akan sumber daya

alam. Sehingga sumber daya alam, khususnya yang terbatas, harus tetap dijaga kelestariannya agar tetap dapat memberikan manfaat untuk generasi yang akan datang. Peraturan pemerintah untuk Perseroan Terbatas yang mewajibkan perusahaan melakukan pertanggungjawaban sosial yaitu Nomor 47 Tahun 2012. Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan salah satu bagian penting di dalam perusahaan. Program ini membantu perusahaan untuk dapat terus berkembang secara berkelanjutan. Jika perusahaan memiliki *image* baik, maka akan mempermudah perusahaan untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari *stakeholder* agar dapat terus eksis dalam menjalankan perusahaan. Selain itu, program ini juga membantu pemerintah untuk mengawasi dan membatasi kegiatan operasional perusahaan, terutama yang terdapat kaitannya dengan sumber daya alam.

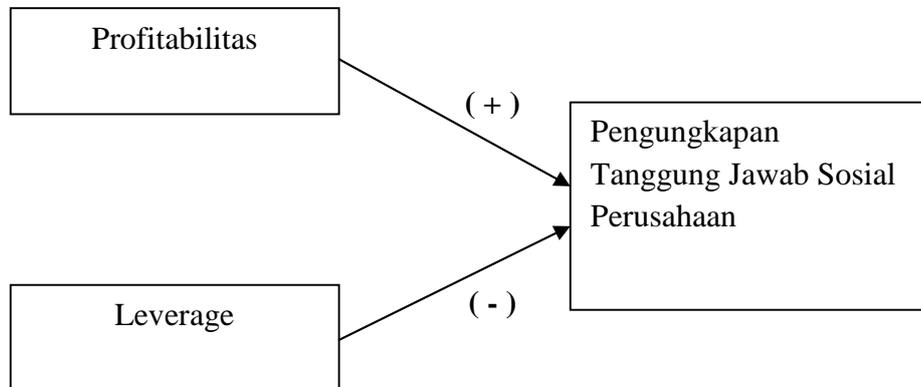
Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial perusahaan nya. Sementara itu semakin tinggi leverage perusahaan, maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melanggar perjanjian hutang dan menghilangkan kepercayaan dari pihak pemberi pinjaman (Nur dan Priantinah 2012). Perusahaan akan cenderung berusaha melaporkan laba yang lebih tinggi salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengurangi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Perusahaan dengan skala besar biasanya memiliki biaya keagenan yang juga besar, maka perusahaan akan cenderung lebih banyak mengungkapkan informasi untuk mengurangi biaya keagenan. Salah satu informasi yang dapat diungkapkan secara luas yaitu tanggung jawab sosial. Kemudian ada beberapa studi terkini tentang IFRS salah satunya adalah yang dilakukan oleh Yip & Young (2012) menemukan bahwa konvergensi IFRS dapat meningkatkan kualitas informasi. Selanjutnya ada penelitian Doukakis (2010) atas perusahaan non keuangan yang terdaftar di *Athens Stock Exchange* menemukan bahwa implementasi IFRS tidak memberikan dampak terhadap persistensi laba. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara laba sesudah penerapan IFRS dengan penerapan *The Greek Accounting Standard*.

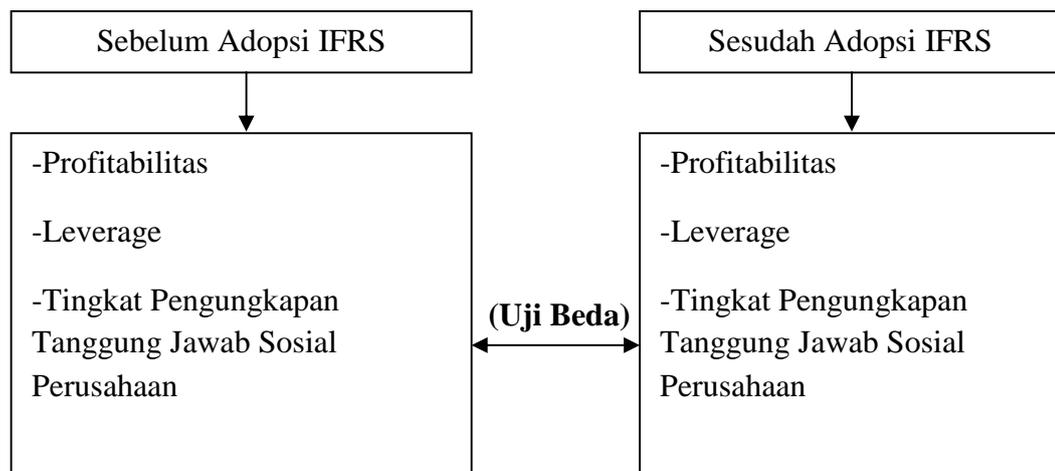
Dengan beberapan perbedaan hasil penelitian tentang manfaat IFRS tersebut maka penelitian ini juga akan menguji adakah perbedaan atau perubahan yang signifikan terhadap kinerja keuangan (profitabilitas dan leverage) serta tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya *International Financial Reporting Standards (IFRS)* pada perusahaan-perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.

Berdasarkan uraian di atas maka, model penelitian yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.2
Model Penelitian 1



Gambar 2.3
Model Penelitian 2



2.4 Pengembangan Hipotesis

Penelitian ini dilakukan untuk memberi gambaran tentang praktek pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan di Indonesia dan mengetahui pengaruh kinerja perusahaan (profitabilitas dan *leverage*) terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan serta memberikan informasi tentang perbedaan kinerja keuangan dan tingkat pengungkapan tanggung jawab

sosial perusahaan sebelum dan sesudah diterapkannya IFRS pada seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2013.

2.4.1. Pengaruh *Profitabilitas* Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Profitabilitas atau keuntungan perusahaan merupakan hasil dari kebijaksanaan dan keputusan yang dibuat oleh manajemen. *Profitabilitas* dapat diukur melalui rasio profitabilitas yang akan menunjukkan seberapa efektif perusahaan beroperasi sehingga menghasilkan keuntungan pada perusahaan.

Heinze (1976) dalam Fahrizqi (2010) menyatakan bahwa *profitabilitas* merupakan faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial yang dilakukan oleh perusahaan.

Sembiring (2005) menyatakan besar kecilnya profitabilitas suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial. Dalam hasil penelitian Fahrizqi (2010) menyatakan secara parsial profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dengan arah positif.

Berdasarkan uraian diatas, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1: *Profitabilitas* yang diprosikan dengan ROA berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan.

2.4.2. Pengaruh *Leverage* Terhadap Tingkat Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Menurut Makmun (2002) dalam Bramantya (2010) *Leverage* keuangan (*ratio leverage*) adalah perbandingan antara dana-dana yang dipakai untuk membiayai perusahaan atau perbandingan antara dana yang diperoleh dari eksternal perusahaan (dari kreditur-kreditur) dengan dana yang disediakan pemilik perusahaan. Rasio tersebut digunakan untuk memberikan gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak tertagihnya suatu utang.

Sembiring (2003) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan dalam penelitian Fahrizqi (2010) menyatakan besar kecilnya *leverage* tidak mempengaruhi luas pengungkapan sosial perusahaan secara signifikan. Penelitian Balkaoui dalam Anggraini (2006) menemukan hasil ada hubungan negatif antara pengungkapan sosial dengan tingkat *financial leverage*, hal ini berarti semakin tinggi rasio utang/modal semakin rendah tingkat tanggung jawab sosial perusahaannya karena semakin tinggi tingkat leverage maka semakin besar kemungkinan perusahaan akan melanggar perjanjian kredit. Berdasarkan uraian diatas, diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Leverage* yang diproksikan dengan DER Berpengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan pertambangan.

2.4.3 Perbedaan Laporan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Beserta Variabel yang Mempengaruhinya Sebelum dan Sesudah Konvergensi IFRS

Sebagai bahasa informasi dunia usaha, akuntansi sangat identik dengan pelaporan keuangan beserta seluruh proses yang menyertainya, yang diawali dengan pencatatan transaksi dan berakhir dengan penyusunan laporan keuangan. Para pemakai laporan keuangan sangat membutuhkan informasi yang berkualitas agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan posisinya.

Dampak penerapan IFRS bagi perusahaan sangat beragam tergantung jenis industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki dan juga pilihan kebijakan akuntansi. Ada yang perubahannya besar sampai harus melakukan perubahan sistem operasi dan bisnis perusahaan, namun ada juga perubahan tersebut hanya terkait dengan prosedur akuntansi (Martani, 2012). Dampak lain yang secara umum dapat ditimbulkan dari program konvergensi IFRS adalah akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka, relevansi laporan keuangan akan meningkat, kinerja keuangan akan lebih fluktuatif apabila harga-harga fluktuatif, *Income smoothing* menjadi semakin sulit dengan penggunaan *balance sheet approach* dan *fair value*. (Ismoyo, 2012).

Horton (2010) menemukan adanya peningkatan kualitas lingkungan informasi setelah adopsi IFRS dengan mengukur ketepatan peramalan dan pengukuran lain dari kualitas lingkungan informasi. Liu (2010) menganalisis 50 perusahaan Uni Eropa yang *listed* di USA menemukan bahwa ada perbedaan signifikan pada *net income* dibawah IFRS Uni Eropa dengan US-GAAP. Perbedaan terutama di sebabkan oleh perlakuan akuntansi pada biaya riset dan pengembangan, dana

pensiun, kombinasi bisnis, dan pajak penghasilan tangguhan. Studi terkini yang dilakukan oleh Yip & Young (2012) menemukan bahwa konvergensi IFRS dapat meningkatkan kualitas komparabilitas informasi akuntansi.

Di dalam negeri ada beberapa penelitian tentang dampak konvergensi IFRS diantaranya adalah Ni Kadek Intan dan Ni Made Adi (2014) yang menyatakan bahwa ada perbedaan kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Loan Asset Ratio, Return on Asset, dan Debt Equity Ratio. Sedangkan menurut Ursula dan Pratiwi (2014) ada perbedaan kualitas akuntansi sebelum dan sesudah konvergensi IFRS. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Ada perbedaan pada tingkat *profitabilitas* (ROA) pada perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah implementasi IFRS.

H4 : Ada perbedaan pada tingkat *leverage* (DER) pada perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah implementasi IFRS.

H5 : Ada perbedaan pada tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) pada perusahaan pertambangan sebelum dan sesudah implementasi IFRS.